

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Aminudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Balfas, Hamud M., 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta.

Budi Untung, Hendrik, 2009, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuady, Munir, 2008, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ilmar, Aminuddin, 2010, *Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kairupan, David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Muhamad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasarudin, M. Irsan, *et al.*, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Nasution, Bismar, 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Pramono, Nindy, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Prasetya, Rudhi, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rustanto, 2012, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur.

Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Saliman, Abdul R., 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim, H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Sihombing, Jonker, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT Alumni Bandung, Bandung.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

B. Jurnal, Artikel, Makalah, Penelitian

Indrastuti Hadiputranto, Sri dan A. Oktavinanda, Pramudya, “Penanaman Modal Asing Melalui Pasar Modal, Ketidakpastian Hukum Yang Belum Tuntas Terjawab”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. V Edisi 7 Desember 2013-April 2014.

Indrastuti Hadiputranto, Sri & Suhendro, Susanti, “Transaksi Benturan Kepentingan:Sebuah Perbandingan”, *Jurnal Hukum Pasar Modal*, Edisi 1 Januari 2005.

Oentoeng Soebagjo, Felix, “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan, dan Peleburan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26- No. 3, Tahun 2007*.

Makes, Yozua, “Implementasi Hukum Penanaman Modal Langsung Terhadap Perusahaan Terbuka Suatu Kajian Umum Atas Perka BKPM No.5/2013 Dan Apa Yang Akan Terjadi Seandainya Perka BKPM No. 5/2013 Tidak Diubah Dengan Perka BKPM No. 12/2013”, *Jurnal Hukum Pasar Modal*, Vol. V, Edisi 7, Desember 2013-April 2014.

Kadri, Muhamad, “Implikasi Penerapan Perka No. 5 Tahun 2013 Dalam Praktek Kegiatan Investasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pasar Modal*, Vol. V, Edisi 7, Desember 2013-April 2014.

Cahyawati, Mardaleni, 2005, *Akibat Hukum Penggabungan Perseroan*, Tesis,

Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tirthayatra, I Made B, "Peraturan Bapepam atas Merger dan Akuisisi",
<https://bkpmplus.files.wordpress.com/2012/06/peraturan-merger-dan-akuisisi.pdf>, tanggal 14 September 2015, pukul 10.00 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943).

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944).

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741).

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144).

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5780).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5644).

Peraturan IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 52/PM/1997, tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan.

Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Black's Law Dictionary, Sixth Edition, Henry Campbell Black, M.A., West Group, 1998.